

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU ( STUDI KASUS PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN  
SUNGAI BATANG KUANTAN DESA PASIR KERANJI)**

**Oleh : Doan Prayogi/ 1201154137**

(doanprayogi@gmail.com)

**Pembimbing : Dr. Febri Yuliani M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

**Abstract**

*Environmental policy is a manifestation of sustainable management and utilization of natural resource and environment. In Batang Kuantan River Pasir Keranji Village there are many mining activities that cause river pollution. Based of research showed Environmental Impact Assessment Program by environmental Agency is not optimally yet. Based on this, researcher are interested to studying how the Implementation of Environmental Management Program of Indragiri Hulu Regency ( Case Study Environmental Impact Assessment Program Batang Kuantan River Pasir Keranji Village). Theoretical concept used is implementation in Van Meter and Van Horn (2008) who said that there was several variables that affected the performed of the public policy implementation. This research used qualitative method by using snowball as information and the data analys thecnique by using triangulation technique. Result of the research showed that Implementation of Environmental Management Program of Indragiri Hulu Regency ( Case Study Environmental Impact Assessment Program Batang Kuantan River Pasir Keranji Village) is not optimally yet. This is caused lack of resources, infrastructure, insufficient funds. Social and economic factors of society become obstacle in Implementation of Environmental Management Program especially Environmental Impact Assessment Program in Batang Kuantan River.*

*Keyword : Environmental Management Program, Implementation, Batang Kuantan River.*

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lain.

Menurut Otto Soemarwoto dalam Supriadi (2008:4), sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.

Kebijakan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (*sustainability*) dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat, artinya dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat.

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan menurut

Sukandarrumidi (2000:50) dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

### 1. Aspek Kimia

Penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah akibat masuknya unsur kimia yang berasal dari kegiatan pertambangan yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan sarana penunjang juga mempunyai potensi pencemaran. Kegiatan-kegiatan tersebut berpotensi melepaskan limbah cair, padat maupun gas ke lingkungan dengan karakteristik fisik maupun kimiawi berbeda.

### 2. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya

Kegiatan pertambangan yang merupakan kegiatan padat teknologi dan padat modal, merupakan sumber devisa negara. Perputaran ekonomi pada saat proyek berlangsung sudah tentu akan merangsang pertumbuhan sektor perekonomian terkait. Tersedia dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat walaupun kehadiran masyarakat pendatang untuk ikut berkompetisi tak dapat di hindari. Dengan masuknya berbagai ragam budaya dan pola hidup setiap orang yang terlibat dalam proyek pertambangan ini, secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

### 3. Aspek Kesehatan dan Keamanan

Dengan beragamnya pola hidup serta status sosial masyarakat, ditambah dengan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, akan mengakibatkan munculnya berbagai jenis penyakit pada masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak ada atau jarang terjadi. Adanya perubahan

kehidupan sosial, sehingga tidak jarang timbul masalah akibat adanya perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat setempat. Hal tersebut sangat memungkinkan timbulnya kerawanan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pertambangan itu sendiri.

Salah satu usaha penambangan yang banyak dilakukan di Indonesia adalah penambangan bahan galian golongan C baik yang memiliki izin (legal) maupun yang tidak memiliki izin (ilegal). Kekayaan potensi bahan galian golongan C berupa material batu dan tanah timbun mengakibatkan maraknya kegiatan penambangan batu dan tanah timbun di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dari beberapa jenis bahan galian golongan C yang paling banyak dilakukan adalah pasir, kerikil, batu kali dan tanah timbun. Usaha tersebut harus mendapat perhatian serius, karena sering kali usaha penambangan tersebut dilakukan dengan kurang memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan hidup.

Akibat dari aktivitas penambangan tersebut seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan terutama pencemaran dan kerusakan biota sungai sehingga memberi dampak yang buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Terlebih lagi eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran dapat berdampak buruk bagi lingkungan hidup dalam waktu yang lama sehingga regenerasi berlangsung lama.

Sungai Batang Kuantan merupakan sungai yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu. Sungai ini juga menghubungkan antara Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir. Di Kecamatan Pasir Penyau Kab. Indragiri Hulu terdapat empat desa yang berada di sepanjang sungai Batang Kuantan, salah satunya ialah Desa Pasir Keranji. Di desa ini terdapat banyak aktivitas

penambangan di sepanjang aliran sungai, salah satunya adalah aktivitas penambangan bahan galian C baik pasir maupun kerikil. Aktivitas penambangan bahan galian tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian tetap oleh pemilik modal usaha tambang yang bersifat perorangan maupun para pekerja tambang yang sebagian besar merupakan warga desa Pasir Keranji.

Besarnya jumlah bahan galian C yang ada di Sungai Batang Kuantan menjadi objek utama bagi para penambang untuk melakukan penambangan serta menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian meskipun belum terdaftar secara resmi. Terdapat 5 pemilik usaha tambang yang ada di Desa Pasir Keranji yakni terdiri dari 3 orang berasal dari Desa Pasir Keranji dan 2 orang berasal dari Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyau. Kegiatan penambangan tersebut justru hanya menguntungkan beberapa pihak antara pemilik modal dan pekerja tambang.

Berlangsungnya aktivitas penambangan bahan galian C yang ada di Sungai Batang Kuantan menyebabkan sungai menjadi tercemar dan merugikan masyarakat yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari. Penambangan yang dilakukan juga mengakibatkan erosi terjadi di bibir sungai serta sungai menjadi semakin keruh. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu khususnya Badan Lingkungan Hidup telah melakukan program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup namun program tersebut tidak berjalan maksimal khususnya dalam masalah pengkajian dampak lingkungan untuk penanganan pencemaran lingkungan akibat aktivitas penambangan di Desa Pasir Keranji. Pengawasan yang dilakukan pemerintah juga dinilai masih kurang bahkan tidak memberikan efek jera bagi para pekerja tambang dan juga pemilik modal usaha.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

*“Untuk program pengelolaan lingkungan hidup secara umum kami telah mengeluarkan beberapa kegiatan: 1) Pemanataan kualitas lingkungan, 2) Pengkajian dampak lingkungan, 3) Pengelolaan limbah B3 (padat, cair, dan gas) namun untuk masalah pencemaran sungai Batang Kuantan akibat penambangan kami masih belum sampai kesana dikarenakan belum ada laporan dari pihak terkait” (Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan hidup Kab. Indragiri Hulu)*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa belum adanya pelaksanaan program pengkajian dampak lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal penanganan pencemaran lingkungan. Eksploitasi secara besar dan ilegal sangat merugikan daerah karena disamping kontribusi untuk daerah tidak jelas, penambangan ini juga mengancam kerusakan lingkungan. Aktivitas penambangan galian C tersebut menyebabkan aliran sungai di Desa Pasir Keranji mengalami pendangkalan dan pengendapan lumpur tinggi. Air sungai menjadi keruh juga menghancurkan habitat ikan, udang dan species hewan sungai lainnya sehingga ekosistem disungai tersebut sudah tidak berimbang.

Penambangan bahan galian tersebut menyebabkan air sungai tercemar. Disamping itu juga mengakibatkan kualitas air sungai menjadi menurun sehingga merugikan masyarakat desa setempat yang memanfaatkan air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari. Aktivitas tambang juga mengakibatkan kondisi jalan desa menjadi rusak akibat pengangkutan hasil tambang. Selain itu erosi juga terjadi dibibir sungai akibat banyak penambang yang mengeksploitasi galian tersebut.

Sebagian besar masalah administrasi negara bersumber dari persoalan masyarakat.

Administrasi negara merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan masyarakat. Kemudian letak hubungan antara implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan lingkungan hidup dengan administrasi negara yaitu, para administrator khususnya Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menyelesaikan persoalan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup akibat penambangan galian C di Desa Pasir Keranji.

Dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 3 menyebutkan bahwa “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing”. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup khususnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu. Namun hingga saat ini belum ada program dan keseriusan dari Pemerintah untuk menangani masalah pencemaran yang ada di Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pokok Sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji ) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak

Lingkungan Sungai Batang Kuantan  
Desa Pasir Keranji ) ?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji ).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji ).

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis
  1. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu yakni ilmu administrasi publik, khususnya di bidang implementasi kebijakan.
  2. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut, tentang permasalahan dan kajian yang sama di masa yang akan datang.
- b. Secara praktis
  1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
  2. Sebagai bahan informasi atau gambaran yang lebih rill, khususnya mengenai Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji ).

### 1.4 Konsep Teori

#### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai tahapan praktis dan aktivitas dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut George C. Edwards III dalam Subarsono (2009:90-91), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni :

- a) Komunikasi,
- b) Sumberdaya
- c) Disposisi
- d) Struktur birokrasi

Menurut Grindle dalam Nugroho (2011:627) bahwa setelah kebijakan di transformasikan, barulah setelah itu implementasi kebijakan dapat dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Menurut Mazmanian, D.A dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2008:184) dalam mempelajari masalah implementasi kebijakan, berarti berusaha memahami “apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan” yakni peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Purwanto dkk. (2012:20) mengemukakan bahwa : Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pelaksanaan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2014:159-163), variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah :

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan
2. Sumber sumber kebijakan
3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan
4. Karakteristik badan pelaksanaan
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
6. Disposisi atau sikap pelaksana

Berdasarkan uraian teori implementasi kebijakan, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn karena teori ini memiliki variabel yang relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti yang menyatakan ada beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan publik yaitu, standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, komunikasi inter-organisasional, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana.

## 2. Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sebuah program dapat dikatakan berhasil atau baik apabila ada manfaatnya atau pengaruh yang positif bagi masyarakat. Menurut Solichin (2009:71) mengatakan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki durasi waktu tertentu serta dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Nawawi (2007:174) mengemukakan pendapatnya bahwa program dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Umar (2005:15) mengatakan bahwa program pada hakikatnya adalah

kumpulan proyek, dalam hal ini proyek bisa disamakan dengan program.

Disamping itu Abadi dalam Jones (2012:19) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, pemberian tugas, langkah-langkah yang diambil, sumber sumber yang dimanfaatkan dan elemen-elemen yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu. Program ini biasanya dijabarkan dan dirincikan dalam sebuah proyek-proyek yang didukung oleh anggaran namun sebaik apapun program tanpa adanya implementasi tidak akan mungkin sasaran atau tujuan yang dikehendaki akan tercapai.

Ada beberapa karakteristik sebuah program diantaranya yaitu :

1. Program cenderung membutuhkan staf sebagai pelaku pelaksanaan dari sebuah program
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri
3. Program memiliki identitas sendiri yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Sebuah program memiliki beberapa aspek didalamnya yaitu :

1. Tujuan yang akan dicapai
2. Strategi yang diambil dalam mencapai tujuan
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
5. Strategi pelaksanaan

Berdasarkan komponen diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya suatu program segala bentuk rencana akan dapat tersusun dan tertata dengan baik satu-persatu sehingga mudah untuk dioperasionalkan, hal ini sesuai dengan definisi program yaitu proyek yang telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat

dilaksanakan secara keseluruhan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 3. Lingkungan Hidup

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk umat manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian lingkungan hidup secara terperinci, antara lain:

#### 1. Kesatuan Ruang

Maksud kesatuan ruang, yang berarti ruang adalah suatu bagian tempat berbagai komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses interaksi di antara berbagai komponen lingkungan hidup tersebut. Jadi, ruang merupakan suatu tempat berlangsungnya ekosistem, misalnya ekosistem pantai, ekosistem hutan. Ruang atau tempat yang mengitari berbagai komponen lingkungan hidup yang merupakan suatu ekosistem satu sama lain pada hakikatnya berwujud pada satu kesatuan ruang.

#### 2. Daya

Daya atau yang disebut juga dengan energi atau tenaga merupakan sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja atau dengan kata lain energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja.

alam lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti energi cahaya, energi panas, energi magnet, energi listrik, energi gerak, energi kimia, dan lain-lain.

#### 3. Keadaan

Keadaan disebut juga dengan situasi dan kondisi. Keadaan memiliki berbagai ragam yang satu sama lainnya ada yang membantu berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, ada yang merangsang makhluk hidup untuk melakukan sesuatu, ada juga yang mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik. Sebagai contoh misalnya kucing atau musang dalam waktu gelap bukannya tidak bisa melihat justru lebih mempertajam matanya untuk mencari mangsa atau makanannya. Dalam keadaan berisik, pada umumnya orang sulit untuk tidur nyenyak atau pulas. Dalam keadaan miskin masyarakat cenderung merusak lingkungannya.

#### 4. Makhluk Hidup

Makhluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat dominan dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup memiliki ragam yang berbeda satu sama lainnya. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan peranannya dalam lingkungan hidup sangat penting, tetapi makhluk hidup seperti itu tidaklah merusak dan menemari lingkungan, lain

halnya dengan manusia.

Menurut Emil Salim (1985) dalam Amos Neolaka (2008:27) lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut Otto Soemarwoto dalam Supriadi

(2008:3) lingkungan hidup adalah jumlah semua dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat. tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan mengguyuhkan apa adanya.

### 2. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dikantor pemerintah daerah Kab. Indragiri Hulu yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, Kantor Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyau, Penambang bahan galian C dan Masyarakat Desa Pasir Keranji Kab. Indragiri Hulu. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi ini karena banyaknya para penambang bahan galian C di Desa Pasir Keranji yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

### 3. Informan penelitian

Dalam menentukan informan penelitian ini adalah dengan cara *snowball sampling* yaitu penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian mencari informan lain yang terlibat dalam proses Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji ) sehingga jumlah informan semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Adapun yang menjadi *key informan* adalah :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Indragiri Hulu
2. Kepala Desa Pasir Keranji
3. Penambang Bahan Galian C
4. Pemilik Modal Tambang Bahan Galian C
5. Masyarakat Desa Pasir Keranji

### 3. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer : adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung pada data yang dibutuhkan. Data tersebut berupa hasil wawancara serta Informasi mengenai Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji )
2. Data Sekunder : adalah data yang diperoleh dari laporan instansi dan keterangan lainnya yang mendukung penelitian ini, diantaranya terdiri dari :
  1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau.
  3. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Indragiri Hulu
  4. Profil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri

Hulu, Kantor Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu, Penambang bahan galian C dan Masyarakat Desa Pasir Keranji Kab. Indragiri Hulu. Penulis mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji ).

## **b. Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan langsung mendalam, tidak berstruktur dan individual antara peneliti dengan informan penelitian dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini hal yang diwawancarai berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji ).

## **c. Studi Kepustakaan**

Yaitu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur maupun dokumen dari perpustakaan yang berhubungan atau berkaitan dengan judul dan masalah yang akan dibahas. Pengumpulan data dengan cara membaca literatur seperti buku, jurnal, dan pemberitaan media massa seputar masalah penelitian, atau dapat juga dari beberapa dokumen mengenai gambaran umum lokasi penelitian atau hal-hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian yang berhubungan dengan judul

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat penalaran mengenai fenomena-

fenomena yang akan diteliti, setelah data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara kemudian penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama di lapangan dengan Judul Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji ). Analisis fenomena di lapangan peneliti menggunakan teori Van Meter & Van Horn.

### **1. Ukuran Dasar atau Tujuan Kebijakan**

Ukuran Dasar adalah suatu standar yang dijadikan sebagai patokan berdasarkan hasil pengkajian yang telah di patenkan secara resmi. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Biasanya berbentuk dokumen formal yang berisi spesifikasi, teknis, maupun kriteria- kriteria yang telah di tetapkan. Sedangkan tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dan tujuan dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji ) tujuan kebijakannya dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara berikut :

*“Kalau berbicara tentang tujuan atau standar dibuatnya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ini saya rasa sudah cukup jelas, agar lingkungan hidup khususnya sungai yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini bebas dari pencemaran serta habitat yang ada didalamnya tetap terjaga. Untuk itu kami sangat menyayangkan apabila ada perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai. Selain merusak sungai tentunya merugikan masyarakat yang ada disekitar apalagi masyarakat Indragiri Hulu rata-rata banyak yang bertempat tinggal disepanjang aliran sungai. ”.*

**Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, Imron Hidayat S.Sos, 11 Juli 2017**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, ukuran dasar atau tujuan dari program pengelolaan lingkungan hidup khususnya program pengkajian dampak lingkungan ialah sebagai upaya agar lingkungan hidup terus mampu mendukung kehidupan manusia, terutama pada pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ini merupakan implementasi kebijakan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

## **2.Sumber-sumber Kebijakan**

Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan serta sebagai penunjang sebuah kebijakan atau program dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu telah membagi tugas atau menurunkan tim yang diarahkan untuk memantau serta mengkaji kualitas air sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji.

Koordinator yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan anggotanya serta mempermudah dalam pembagian tugas. Sebagai implementor kebijakan yang merupakan salah satu penunjang keberhasilan kebijakan harusnya benar-benar mampu dan bertanggungjawab dalam mengemban tugas yang telah diberikan, apalagi salah satu kunci terealisasinya kebijakan ini ada pada tahap pemantauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten serta paham akan prosedur dan tugas yang telah ditetapkan.

Selain sumber daya manusia yang menjadi penunjang terimplementasinya kebijakan, sumber dana, sarana dan prasarana juga mempengaruhi kinerja implementor kebijakan. Karena dana, sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk untuk mencapai maksud dan tujuan kebijakan. Ketersediaan dana,

sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan demi terselenggaranya tujuan yang diharapkan. Maka apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka kegiatan yang dilakukan akan mengalami hambatan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

### **3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan**

Dinas Lingkungan hidup bekerjasama dengan beberapa pihak atau instansi yang memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan ini, seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Sampai saat ini pihak-pihak tersebut memberi dukungan serta kontribusi demi terealisasinya pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan di Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji. Untuk memperoleh hasil implementasi kebijakan yang optimal, masyarakat yang menjadi kelompok sasaran perlu memperoleh informasi yang memadai tentang kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut.

Selain itu, untuk memperkenalkan program yang sedang dilaksanakan melalui penyampaian informasi terkait pelaksanaan kebijakan kepada kelompok sasaran, dapat diketahui apakah kelompok sasaran memberikan dukungan atau justru menolak kebijakan yang sedang diimplementasikan, karena dukungan dari kelompok sasaran merupakan garansi awal bahwa implementasi kebijakan akan berjalan dengan lancar. Dalam tahap sosialisasi, implementor kebijakan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, seperti : latar belakang mengapa kebijakan dibuat, tujuan kebijakan, siapa yang berhak untuk mendapatkan manfaat kebijakan, apa hal-hal yang harus dilakukan agar tujuan kebijakan dapat dicapai, apa saja manfaat yang didapat apabila kebijakan dapat terimplementasi.

### **4. Karakteristik Badan Pelaksana**

Implementor kebijakan atau dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal dalam menangani dan memantau program pengkajian dampak lingkungan kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan efek dan belum mengetahui tentang program tersebut. Hal ini belum sesuai dengan pedoman program Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertera didalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

Pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah menyangkut berbagai aspek mengenai bagaimana tujuan suatu kebijakan dapat dicapai dengan mengikuti tahapan yang tertera, jadi implementor kebijakan sudah tinggal mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Didalam pelaksanaan kebijakan Juklak dan Juknis ataupun *Standar Operating Procedure* (SOP) memuat prosedur kerja secara rinci dan sistematis mengenai serangkaian instruksi pekerjaan yang harus dilakukan, jadi nantinya akan mempermudah implementor kebijakan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

### **5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Kondisi sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok sasaran kebijakan memiliki banyak pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang telah lama beraktivitas sebagai penambang di Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji. Masyarakat Desa Pasir Keranji bisa dikatakan memiliki tingkat atau taraf hidup menengah kebawah sehingga rata-rata banyak yang menjadi pekerja tambang di Desa tersebut.

Selain itu, dapat diketahui bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu aspek penunjang terimplementasinya kebijakan atau program pengkajian dampak lingkungan sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup di Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji. Pelaksanaan kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah Sedangkan kondisi sosial ekonomi kurang mendukung pelaksanaan kebijakan karena berdasarkan hasil wawancara dilapangan masih terdapat aktivitas pertambangan yang masih berjalan sehingga menyebabkan pencemaran sungai Batang Kuantan yang menjadi sumber air bagi masyarakat Desa Pasir Keranji

## 6. Disposisi/sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu merespon dengan baik pelaksanaan kebijakan, mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh atasan berdasarkan kewajiban dan kepentingan organisasi. Sebagian besar implementor kebijakan paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan ini serta menilai bahwa program tersebut memang sepatutnya digalakan dalam mengedepankan kearifan lingkungan untuk menjaga sungai dengan baik sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketetapan yang seharusnya.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sebagian besar implementor kebijakan merespon kebijakan dengan baik dan mendukung pelaksanaan kebijakan dengan melakukan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan meski tidak seluruhnya. implementor kebijakan menerima dengan baik kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena

mengetahui arah tujuan kebijakan serta menilai bahwa kebijakan yang ditetapkan memiliki manfaat besar bagi perkembangan daerah.

## B. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengkajian dampak lingkungan dapat dilihat dari realisasi dan sosialisasi kepada masyarakat apakah sudah mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan ataupun belum. Program Pengkajian Dampak Lingkungan bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penerbitan dokumen lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL, UKL/UPL dan SPPL sebagai salah satu syarat pengoperasian usaha/kegiatan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha/kegiatan tersebut.

- a. Sumber daya kebijakan baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai. Kurangnya kompetensi aparatur dalam usaha pemantauan lingkungan hidup kepada masyarakat sehingga belum mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Sarana prasarana serta defisit anggaran dalam menjalankan program pengelolaan lingkungan hidup masih terjadi. Hal ini menjadi penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup khususnya program pengkajian dampak lingkungan di Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji.
- b. Masih kurangnya peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya

program pengelolaan lingkungan hidup di Sungai Batang Kuantan.

- c. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat Desa Pasir Keranji yang tergolong menengah kebawah sehingga belum memiliki pekerjaan layak dan beralih sebagai pekerja tambang sehingga menyebabkan semakin banyak masyarakat yang berkerja sebagai penambang di Sungai Batang kauntan Desa Pasir Keranji

Faktor- faktor tersebutlah yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji ).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ( Studi Kasus Pengkajian Dampak Lingkungan Sungai Batang Kuantan Desa Pasir Keranji ) belum terimplementasi dengan baik karena realisasi dan respon masyarakat belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kurangnya peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya program pengelolaan lingkungan hidup di Sungai Batang Kuantan. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat Desa Pasir Keranji yang tergolong menengah kebawah sehingga belum memiliki pekerjaan layak dan beralih sebagai pekerja tambang sehingga menyebabkan semakin banyak masyarakat yang berkerja sebagai penambang di Sungai Batang kauntan Desa Pasir Keranji`

### **B. Saran**

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu hendaknya fokus dan melakukan pemantauan secara maksimal kepada masyarakat tentang pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup khususnya program pengkajian dampak lingkungan sehingga aktivitas penambangan yang menyebabkan pencemaran sungai di Desa Pasir Keranji dapat diatasi dengan baik.
2. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia agar memiliki keahlian dan keterampilan dalam hal pengawasan serta pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan ketersediaan sarana dana prasarana yang memadai dalam menjalankan program sehingga mampu menjalankan dan mensosialisasikan program pengelolaan lingkungan hidup khususnya program pengkajian dampak lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau yang menjadi acuan dalam menjalankan program dari Pemerintah Daerah atau Dinas terkait. Sehingga tujuan dari program tersebut bisa tercapai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. : Alfabeta : Bandung
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.

- Jones, Charles O. 2012. *Pengantar Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press : Jakarta.
- Kencana, Inu Syafie. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. PT Rineka Cipta : Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya : Bandung.
- Nawawi, Ismail. 2007. *Public Policy*. : PMN : Surabaya
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Rosdakarya : Bandung.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Persons, Wayne. 2011. *Public Policy Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan*. Kencana : Jakarta.
- Prasetya, Irawan. 2006. *Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Self Press : Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media : Yogyakarta.
- Salim, Peter, Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. English Press : Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara : Jakarta
- Siswanto. 2014. *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Solichin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Erlangga : Jakarta
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf Riau : Pekanbaru.
- Sukandarrumidi.2000. *Bahan Galian Industri*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta
- Suripin. 2005. *Pelestarian Sumber Daya Tanah Dan Air*. Andi : Jakarta
- Tachjan. 2005. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI : Bandung.
- Umar, Husein. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan ( Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif, Kuantitatif, dan Modern )*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UM Press : Malang.

#### **Dokumen :**

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau.